**PERANAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LANDAK DALAM PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT NGABANG**

**Oleh:
MUHAMAD SADIKIN
NIM. E42010048**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2014. *E-mail* : sadikin09@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peranan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak dalam melakukan pengelolaan pasar tradisional. Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pengelolaan Pasar Rakyat Ngabang yang masih belum maksimal. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Manajemen dari G.R. Terry yaitu perencanaan, pengawasan, penggerakan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya peranan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak dalam mengelola Pasar Rakyat Ngabang yang dilihat dari tidak adanya inovasi program dalam perencanaan pengelolaan pasar, pengorganisasiannya belum maksimal, dan kurangnya personil atau sumber daya sehingga pelaksanaan dan pengawasan tidak bisa dilakukan secara efektif. Untuk itu, rekomendasinya adalah pemerintah daerah perlu memberikan perhatian dan menyediakan anggaran pengelolaan pasar serta melaksanakan pengelolaan pasar dengan benar dan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kata kunci: Peranan, Pemerintah, Pengelolaan, Pasar

**THE ROLE OF DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN LANDAK REGENCY IN MANAGING
PASAR RAKYAT NGABANG**

**By:
MUHAMAD SADIKIN
NIM. E42010048**

ABSTRACT

Writing of this thesis is intended to describe the role of Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Landak Regency in managing traditional market and to know the constraints of that management. This thesis was appointed based on the issue of Pasar Rakyat Ngabang's management that are still not maximized. The theory used in this thesis as a blade of analysis is Management theory by G.R. Terry with Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. This research used the qualitative research method and the genre of research is descriptive. The results of this research that indicate is role of Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Landak Regency in managing Pasar Rakyat Ngabang still not optimal. This is evident from the lack of innovation in management planning program market, the organization is not maximized, and the lack of personnel or resources to the implementation and controlling can not be done effectively. For that, the recommendation is local governments need to give attention and provide market management's budget and implement management market properly and guided by government regulations

Keywords: Role, Government, Management, Market

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di daerah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, perajin dan industri rumah tangga yang merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat dan mereka menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi tempat berinteraksi antara produsen dan konsumen; pemasaran hasil-hasil industri rumah tangga, kerajinan, dan pertanian; menampung pedagang, tenaga kerja lokal; perputaran uang, barang, dan jasa; serta tempat paling mudah bagi masyarakat untuk berbaur (Kemendagri, 2012).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan di tahun 2014 ini pasar

tradisional di seluruh daerah sudah dalam kondisi baik dan nyaman serta dikelola dengan manajemen profesional. Pengelolaan pasar tradisional merupakan bagian dari mendorong terjadinya dinamika ekonomi di suatu daerah, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa pasar tradisional merupakan urusan pilihan, maka pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Adanya kewenangan tersebut Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan pasar tradisional dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan, baik pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,

Swasta maupun Pasar Modern. Pada Perda Kab. Landak No. 3 Tahun 2010 pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan pasar meliputi pemakaian dan pengaturan ruko, toko dan los, pelataran, tempat berjualan atau bangunan pasar yang sah; pengaturan tempat parkir, keamanan dan ketertiban serta kebersihan dalam kawasan pasar; pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar. Berdasarkan Keputusan Bupati No. 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengelola dan Bentuk Pemanfaatan Pasar Tradisional Kabupaten Landak, Pemerintah Kabupaten Landak memberikan mandat kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Landak untuk mengelola Pasar Tradisional.

Pasar Rakyat Ngabang merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Berdasarkan keterangan dari kantor Diskoperindag Kabupaten Landak pada Juli 2014, pasar Rakyat Ngabang memiliki jumlah pedagang sebanyak 139 pedagang. Pasar ini

tidak terlepas dari permasalahan seperti pasar tradisional pada umumnya di Indonesia. Pasar Rakyat Ngabang memiliki permasalahan yang cukup kompleks yang berkaitan dengan standar pengelolaan pasar, seperti fasilitas atau sarana fisik pasar yang kurang diperhatikan, ketidaktertiban pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta keadaan pasar yang *semrawut* karena kebersihan dan penataan yang kurang diperhatikan.

Apabila mengacu pada Perda Kab. Landak No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, hal ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ketersediaan segala fasilitas atau sarana prasarana pasar, pengaturan para pedagang yang berjualan dan memperhatikan kondisi pasar, sehingga pasar itu sendiri dapat berjalan dengan baik, aman dan nyaman sehingga akan benar-benar dapat memajukan perekonomian di Kabupaten Landak.

Permasalahan yang terjadi pada Pasar Rakyat Ngabang menunjukkan bahwa belum optimalnya peranan

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak dalam pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar. Oleh karena itu, penulis memandang perlu membahas dan mengkaji lebih dalam tentang peranan Diskoperindag Kabupaten Landak dalam pengelolaan Pasar Rakyat Ngabang.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah: “Bagaimana peranan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak dalam pengelolaan Pasar Rakyat Ngabang?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak

dalam mengelola pasar tradisional khususnya Pasar Rakyat Ngabang.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan teori dalam bidang Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pasar tradisional.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori

Peran dan fungsi pemerintah dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual, pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan yaitu menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya. Jadi peranan

pemerintah merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun urusan kemasyarakatan.

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah melakukan pengelolaan pasar tradisional dengan manajemen profesional berdasarkan pada peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pengelolaan pasar. Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Hal tersebut juga seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004:13) bahwa pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. “*Management*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi

manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Di dalam mengoperasikan manajemen ada beberapa proses yang harus dijalankan. Berdasarkan pendapat Terry (dalam Wiludjeng, 2007:4) proses-proses manajemen tersebut yaitu meliputi :

- a. **Perencanaan** merupakan suatu proses perumusan atau penentuan tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi.
- b. **Pengorganisasian** merupakan proses pengaturan keseluruhan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi, yang mencakup pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang dan sebagainya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan.

- c. **Penggerakan** merupakan upaya untuk menjadikan rencana yang telah diatur dan diorganisir menjadi kenyataan.
- d. **Pengawasan** merupakan proses atau kegiatan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi, 2008:21) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan dan data yang holistik atau menyeluruh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan lebih jelas. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi, pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Adapun yang menjadi subjek Penelitian ialah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak; pedagang dan pengunjung/pelanggan di Pasar Rakyat Ngabang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan pasar tradisional di daerah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dimandatkan kepada instansi/dinas yang berwenang. Berdasarkan Keputusan Bupati Landak No. 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengelola dan Bentuk Pemanfaatan Pasar Tradisional Kabupaten Landak, pasar tradisional yang ada di Kabupaten Landak dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Landak khususnya pada Bidang Perdagangan, termasuk

pengelolaan terhadap Pasar Rakyat Ngabang sehingga segala permasalahan yang ada di pasar menjadi tanggung jawab Diskoperindag Kabupaten Landak.

Suatu pasar dapat dikatakan pasar yang baik apabila pasar tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dan adanya kepuasan dari para pedagang dan pembeli. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa pada Pasar Rakyat Ngabang masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaannya, yaitu kondisi pasar yang kurang sehat atau *semrawut*, fasilitas pasar yang kurang diperhatikan, ketidaktertiban pedagang, dan ketiadaan unit pengelola pasar. Beberapa permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa proses pengelolaan Pasar Rakyat Ngabang yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Landak ini belum optimal.

Permasalahan yang muncul pada Pasar Rakyat Ngabang dapat terjadi

apabila standar pengelolaan yang ada pada peraturan pemerintah tidak terpenuhi atau dijalankan. Sudah jelas di dalam peraturan mengamanahkan bahwa kondisi pasar harus baik, sehat, dan nyaman dengan memperhatikan sarana atau fasilitasnya; unit pengelola pasar harus berjalan efektif sebagai kepanjangan tangan dari Diskoperindag Kabupaten Landak; dan menjalankan program pembinaan bagi para pedagang; namun pada realitanya hal ini tidak berjalan.

Di dalam melaksanakan pengelolaan pasar, Diskoperindag Kabupaten Landak dapat mengacu kepada standar pengelolaan yang terdapat pada beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pasar, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar dan yang terbaru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Pada peraturan tersebut dipaparkan dengan jelas tentang bagaimana pengelolaan pasar sebaiknya

dilakukan dan apa saja tugas yang harus dikerjakan oleh pengelola pasar.

Untuk menganalisis proses pengelolaan Pasar Rakyat Ngabang yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Landak, penulis menggunakan teori proses manajemen dari Terry yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Penulis akan membahas berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan selama di lokasi penelitian.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang sangat penting untuk dilakukan. Hakikat dari fungsi manajemen adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Di dalam perencanaan berisi kegiatan memilih arah tindakan atau rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang (Winardi, 1990:7). Pemilihan arah atau rencana-rencana ini disesuaikan dengan tujuan suatu

organisasi, sehingga apa tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut menjadi jelas.

Dengan adanya perencanaan, terciptalah program dan pekerjaan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan organisasi. Tanpa adanya perencanaan berarti semua orang yang berada di dalam suatu organisasi bekerja secara acak dan kurang teratur serta tidak mempunyai standar yang jelas. Maka dari itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi.

Diskoperindag sebagai salah satu instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Landak wajib setiap tahunnya memiliki perencanaan program. Program-program tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dari dinas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Diskoperindag Kabupaten Landak dapat diketahui bahwa perencanaan program untuk pengelolaan pasar tradisional termasuk Pasar Rakyat Ngabang

sudah ada. Program tersebut adalah program pengawasan dan pengendalian pasar yang dikerjakan melalui Bidang Perdagangan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian pasar ini dikerjakan apabila ada masalah-masalah yang muncul di lapangan yang berkaitan dengan para pedagang.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan pasar ini tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, hanya sekedarnya saja, artinya mengerjakan program yang memang sudah ada sejak lama, tidak ada inovasi atau pembaharuan program. Padahal apabila pasar ini dikelola dengan benar disertai berpedoman pada peraturan pemerintah yang terbaru, cukup banyak program yang bisa direncanakan dan dijalankan oleh Diskoperindag Kabupaten Landak. Dengan perencanaan dan kerja yang maksimal, harapan masyarakat terutama pedagang dan pembeli/pengunjung Pasar Rakyat Ngabang dapat terpenuhi, terlebih segala permasalahan di pasar yang muncul bisa diminimalisir dan dikelola dengan baik.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian harus dilakukan karena di dalamnya terdapat kegiatan untuk menentukan dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia guna menjalankan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Muara daripada kegiatan pengorganisasian ini adalah terwujudnya struktur organisasi; uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas; adanya wewenang dan tanggung jawab; koordinasi antar tugas atau pekerjaan menjadi jelas; serta sumber daya manusia dan materil yang dibutuhkan dapat diketahui.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapat Diskoperindag Kabupaten Landak, kegiatan pengorganisasian sudah dilakukan melalui struktur organisasi yang telah ada beserta tugas pokok dan fungsinya, pembagian kerjanya jelas, setiap pegawai bekerja sesuai dengan jabatan atau kedudukannya masing-masing dalam struktur organisasi. Diskoperindag Kabupaten Landak

memiliki tiga bidang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu Bidang Koperasi dan UKM; Bidang Perindustrian; dan Bidang Perdagangan. Sedangkan untuk masalah pengelolaan pasar, tugas ini diberikan kepada Bidang Perdagangan.

Dari keterangan yang penulis dapat dari Kasi Bina Usaha Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Landak, idealnya Bidang Perdagangan ini bukanlah bidang yang khusus mengurus masalah pengelolaan pasar, karena menurutnya Bidang Perdagangan itu urusannya penanganan konsumen, monitoring harga, dan sebagainya. Sedangkan untuk masalah pengelolaan pasar seharusnya ada dibentuk Bidang atau Unit khusus, seperti Bidang atau Unit Pasar. Namun pada Diskoperindag Kabupaten Landak, Bidang atau Unit yang tugasnya khusus untuk pengelolaan pasar tidak ada, yang ada hanyalah Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar yang berada di bawah Bidang Perdagangan, itupun

kosong tidak ada pegawai yang mengisi.

Salah satu faktor yang mendukung agar suatu pekerjaan dapat dijalankan dengan baik adalah fokus pada satu pekerjaan dan didukung dengan sumber daya yang cukup, apabila suatu bidang dilimpahkan dengan banyak pekerjaan sementara sumber daya manusia atau pegawai terbatas maka hasil dari pekerjaan tersebut tidak akan bisa maksimal. Inilah masalah yang dialami di Bidang Perdagangan, dengan jumlah pegawai yang hanya empat orang terdiri dari satu Kepala Bidang, satu Kasi Bina Usaha Perdagangan, dan dua orang staf tentu tidak akan bisa bekerja secara maksimal di dalam pengelolaan pasar ini.

3. Penggerakan

Penggerakan mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, sebab fungsi penggerakan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia atau orang-orang sebagai pelaksana dalam organisasi. Penggerakan merupakan

upaya untuk menjadikan rencana yang telah diatur dan diorganisir menjadi kenyataan. Penggerakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, dan mengatur agar setiap pegawai dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Jadi fungsi penggerakan ini berkaitan dengan kepemimpinan, artinya pimpinan memiliki peran dan tanggung jawab karena sebagai penentu berjalan efektif atau tidaknya suatu pekerjaan, program atau kegiatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Diskoperindag Kabupaten Landak, Bidang Perdagangan adalah yang berperan sebagai pelaksana atau penggerak dalam pengelolaan pasar, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan permasalahan-permasalahan mengenai Pasar Rakyat Ngabang menjadi tanggung jawab Bidang Perdagangan, yang dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan 3 (tiga) orang bawahannya. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di Diskoperindag Kabupaten Landak,

penulis menilai bahwa fungsi penggerakan pada Bidang Perdagangan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dengan jumlah personil dan anggaran yang minim, Bidang Perdagangan tidak bisa melakukan banyak hal terhadap pengelolaan pasar ini.

Berkaitan dengan pengelolaan pasar, fungsi penggerakan ini tidak hanya diterapkan kepada para pegawai yang ada di Bidang Perdagangan saja, fungsi penggerakan juga perlu diterapkan kepada para pedagang yang ada di Pasar Rakyat Ngabang, sehingga Bidang Perdagangan memiliki peran ganda di dalam menjalankan fungsi penggerakan. Pada prosesnya muncul masalah ketika fungsi penggerakan ditujukan kepada para pedagang, terutama pedagang yang nakal atau tidak tertib. Masalah yang muncul yaitu Bidang Perdagangan kesulitan dalam menertibkan para pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang semestinya, disebabkan jumlah personil yang minim.

Hal yang wajar hingga saat ini masih terdapat cukup banyak pedagang yang tidak tertib, karena penertiban tidak dilakukan dengan maksimal. Mereka berjualan di sekitar halaman pasar padahal meja/los sudah disediakan tetapi tidak mereka gunakan. Perilaku seperti ini dapat mengganggu ketertiban dan kerapian pasar terutama masalah lahan parkir, selain itu mereka juga mengganggu pedagang lain yang berada di dalam yang merasa dirugikan. Sebenarnya bukan tidak ada upaya yang dilakukan Bidang Perdagangan untuk mengatasi masalah tersebut, namun upayanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Dari hasil pengamatan dan wawancara dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk menangani masalah ketidaktertiban pedagang ini adalah melalui teguran. Teguran yang diberikan baik berupa lisan maupun tertulis. Penulis menilai upaya tersebut sudah baik, namun dengan karakteristik pedagang yang susah diatur harus ada tindakan keras selain berupa teguran. Selain itu, dengan tidak adanya petugas yang

mengawasi secara langsung di lapangan juga menjadi faktor ketidaktertiban pedagang tersebut selalu terjadi. Sedangkan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Bidang Perdagangan secara rutin dengan jumlah personil yang terbatas dan beban kerja yang banyak.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dikerjakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan atau tidak, disamping itu fungsi ini juga diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan dapat tercapai, hal ini penting dilakukan untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan apa yang direncanakan. Secara umum pengawasan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pengawasan langsung yang dilakukan secara langsung oleh

pimpinan dengan melihat sendiri kegiatan yang dikerjakan dan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan jarak jauh artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan bisa lisan maupun tulisan.

Sama halnya dengan fungsi penggerakan, di dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan pasar, Diskoperindag Kabupaten Landak memiliki peran ganda yaitu *pertama* pengawasan kepada pegawai yang bertugas dan *kedua* pengawasan kepada para pedagang. Untuk pengawasan terhadap pegawai ini dilakukan secara berjenjang, Kepala Diskoperindag selaku pimpinan instansi mengawasi secara tidak langsung melalui laporan-laporan yang diberikan oleh petugas yang ada di Bidang Perdagangan. Sedangkan untuk internal Bidang Perdagangan, pengawasan dilakukan oleh Kepala Bidang Perdagangan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Diskoperindag

Kabupaten Landak dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan kepada pegawai Diskoperindag yang bertugas menangani pasar ini sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya, tugas-tugas yang diberikan juga dikerjakan dengan baik oleh para pegawai yang ada di Bidang Perdagangan. Akan tetapi fungsi pengawasan ini tidak bisa dikerjakan secara maksimal ketika pengawasan harus dilakukan terhadap Pasar Rakyat Ngabang beserta para pedagangnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan yang sering muncul terkait dengan pengelolaan pasar ini adalah ketidaktertiban pedagang, pencemaran lingkungan atau kebersihan, fasilitas pasar yang kurang diperhatikan, dan masalah-masalah lainnya. Untuk menghadapi masalah tersebut, diperlukan adanya pengawasan yang khusus dan rutin dilakukan, agar dapat dikontrol dan dievaluasi dengan baik sehingga dapat dicarikan solusi dan penyelesaiannya. Namun untuk melakukan pekerjaan tersebut secara maksimal diperlukan jumlah personil

yang memadai, sementara personil yang ada pada Bidang Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Landak hanya berjumlah 4 (empat) orang, ini sangat terbatas sekali, karena jumlah ideal personil yang diperlukan dalam pengelolaan pasar ini berdasarkan keterangan dari Kasi Bina Usaha Perdagangan adalah sekitar 20-an orang.

Hal inilah yang menjadi kendala bagi Diskoperindag Kabupaten Landak khususnya Bidang Perdagangan, dengan beban kerja yang banyak dan jumlah personil yang minim sementara unit atau tenaga pembantu lain tidak ada, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka wajar saja masalah-masalah tersebut di atas selalu terulang dikarenakan pengawasan yang ketat terhadap pedagang dan kondisi Pasar Rakyat Ngabang jarang dilakukan.

D. SIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan program pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Landak masih belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam peraturan pemerintah tentang pasar, sehingga program yang dibuat hanya program-program itu saja yang memang sudah ada sejak lama namun belum bisa memberikan hasil yang maksimal terhadap pengelolaan pasar.
2. Pengorganisasiannya belum maksimal karena struktur organisasi pada Diskoperindag Kabupaten Landak yang khusus menangani masalah pasar (bidang Pasar) tidak ada. Sebenarnya di bawah Bidang Perdagangan ada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar, namun disayangkan tempat ini kosong atau tidak ada pegawai yang mengisi. Kemudian pegawai yang ada di Bidang Perdagangan juga sangat minim, sehingga berdampak pada pelaksanaan dan hasil yang kurang maksimal.
3. Bidang Perdagangan memiliki peran ganda dalam menjalankan

fungsi pergerakan, pertama untuk personilnya sendiri dan kedua untuk pedagang Pasar Rakyat Ngabang. Fungsi pergerakan terhadap personil Bidang Perdagangan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun terhadap para pedagang belum bisa dilakukan secara maksimal. Unit atau organisasi yang berperan sebagai perpanjangan tangan dari Diskoperindag Kabupaten Landak yang khusus bertugas dalam membantu pengelolaan pasar tidak berfungsi.

4. Pengawasan terhadap personil Bidang Perdagangan yang bertugas sudah berjalan dengan baik melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, namun belum bisa maksimal ketika pengawasan harus dilakukan terhadap Pasar Rakyat Ngabang beserta para pedagangnya. Sulitnya pengawasan dipengaruhi oleh jumlah personil yang minim serta karakteristik pedagang yang susah diatur dan rendahnya kesadaran

untuk selalu menjaga ketertiban dan kenyamanan pasar.

2. Keterbatasan Penelitian

Ketika penelitian dihimbau agar menggunakan pakaian dinas, namun itu justru menjadi penghambat ketika melakukan wawancara kepada masyarakat yang membuat mereka kurang terbuka berbicara. Keterbatasan lainnya dari penulis sendiri sebab ini adalah penelitian ilmiah yang pertama kali dilakukan oleh penulis sehingga masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

E. Apresiasi

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen, Pengelola, Pengasuh, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Landak, khususnya Dinas Koperasi,

Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak yang telah mengizinkan serta membantu memberikan informasi dan data dalam proses penelitian.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasibuan, Malayu. 1996. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.

Jauhari, Heri. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.

Narimawati, Umi. 2003. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Unikom.

Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Satori, Djam'an. dkk. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Siagian, S.P. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Tim. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak: PRODI IP FISIP UNTAN.

Usman, Husaini. 2004. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Surabaya: Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winardi. 1990. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rujukan Dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak 2013

Monografi Kecamatan Ngabang 2014

Profil Dinas Koperasi, Perindustrian,
dan Perdagangan Kabupaten
Landak 2013

Rujukan Internet

Kemendagri, Bangda. 2012.
*Membangkitkan Kembali
Eksistensi Pasar Tradisional,
Melalui*
<<http://bangda.kemendagri.go.id/berita.php?id=109>>, diakses
20 Januari 2014.

Mbahdaur. 2012. *Mengenal
Pengertian Pasar Tradisional,
Melalui*
<<http://mbahdaur.blogspot.com/2012/06/mengenal-pengertian-pasar-tradisional.html>>, diakses 20 Januari 2014.

Sinaga. 2008. *Eksistensi Pasar
Tradisional di Tengah Pesona
Pasar Modern, Melalui*
<<http://litbang.patikab.go.id/index.php/artikel-a-jurnal/121-eksistensi-pasar-tradisional-ditengah-pesona-pasar-modern/108-eksistensi-pasar-tradisional-ditengah-pesona-pasar-modern>>, diakses 20
Januari 2014.

Rujukan Skripsi

Juliadi, Dede. 2012. *Manajemen
Strategi Pengelolaan
Ketertiban Pasar Baru Kota
Cilegon*. Skripsi. Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.

Pane, Marvolomeus. 2013.
*Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dalam
Pengelolaan Pasar (Studi
Pasar Tengah Kecamatan
Bengkayang)*. Skripsi. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura
Pontianak.

Rujukan Regulasi

Keputusan Bupati Landak Nomor 22
Tahun 2012 tentang Penetapan
Pengelola dan Bentuk
Pemanfaatan Pasar Tradisional
Kabupaten Landak

Peraturan Bupati Landak Nomor 18
Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Struktur
Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Koperasi, Perindustrian,
dan Perdagangan Kabupaten
Landak.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Pasar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar
Tradisional.

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 53/M-
DAG/PER/12/2008 Tahun
2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar
Tradisional.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : MUHAMAD SADIKIN
NIM / Periode lulus : E42010048 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Email address / HP : sadikinz09@gmail.com / 085215962949

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERANAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LANDAK DALAM PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT NGABANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal..... 21-01-2015

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Januari 2015

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

(Muhamad Sadikin)